

SKRIPSI

**NETWORK GOVERNANCE DALAM PROGRAM BANK SAMPAH
DI TODDOPULI RAYA KOTA MAKASSAR**

**VALENCIA LAMARANG
E011201017**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Valencia Lamarang
NIM : E011201017
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : *Network Governance* dalam Program Bank Sampah di Toddopuli
Raya Kota Makassar

Telah Diperiksa Oleh Pembimbing dan dinyatakan Layak Untuk Ujian Skripsi,
Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

Makassar, 12 Agustus 2024

Menyetujui,
Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Syahribulan, M.Si

NIP 196009141987022001

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Alwi, M.Si

NIP 196310151989031006

**NETWORK GOVERNANCE DALAM PROGRAM BANK SAMPAH
DI TODDOPULI RAYA KOTA MAKASSAR**

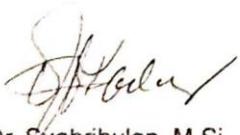
**VALENCIA LAMARANG
E011201017**

Skripsi,

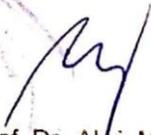
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik
pada tanggal 11 September 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

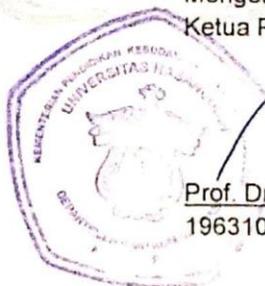
Program Studi Administrasi Publik
Departemen Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar

Menyetujui,
Pembimbing Tugas Akhir


Dr. Syahribulan, M.Si
NIP 196009141987022001

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Prof. Dr. Alwi, M.Si
196310151989031006



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "*Network Governance* dalam Program Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Syahribulan, M.Si). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 09 September 2024

Yang menyatakan,



Valencia Lamarang
E011201017

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kehendak dan tuntunan-Nya dari awal proses penyusunan, penelitian, hingga penulis dapat merampungkan skripsi ini ialah hanya karena anugerah-Nya. Serta atas bimbingan dan arahan dari Dr. Syahribulan, M.Si sebagai dosen Pembimbing Akademik sekaligus menjadi pembimbing dalam penyusunan skripsi. Kepada Prof. Dr. Hamsinah, M.Si. dan Bapak Nuralamsyah Ismail, S.Sos., MA yang telah berkenan menjadi dosen penguji, terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan sehingga menjadi pengetahuan baru bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi. Juga kepada segenap *stakeholder* yang berjejaring dalam program Bank Sampah yaitu UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar, Yayasan Peduli Negeri, serta kepada pengelola Bank Sampah Unit yang telah memberi kesempatan dan kemudahan dalam proses pengambilan data sehingga sangat berguna bagi penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin, Dekan dan Wakil Dekan FISIP UNHAS, dan seluruh dosen serta *staff* di Departemen Ilmu Administrasi yang telah membantu dan memfasilitasi penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

Terima kasih kepada orang tua tercinta Bapak Yulianus Lamarang dan Ibu Sovyana Josevin Sapasuru telah membesarkan dan tak pernah berhenti memberi dukungan dan kasih sayang serta kepada kakak dan adik (Violy dan Vala) yang selalu menjadi penyemangat dan seluruh keluarga besar Lamarang-Sapasuru pengingat bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman seperkampusan terkhusus App Club (Triso, Pneso, Yoel) dan Orel yang telah memberi warna pada fase kehidupan kampus, serta 24/7 peeps (Dipa & Gita) yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah sehingga peneliti merasakan wujud dari "*healthy friendship*". Terima kasih kepada seluruh kerabat yang terlibat dalam masa perkuliahan (Adm Kristen 2020, Pena 2020, D'B3 Voice FISIP Unhas, PMKO FISIP Unhas, Humanis FISIP Unhas, Posko 1 Dampang) atas pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis. Terima kasih kepada semua pihak yang turut merasakan sukacita atas keberhasilan peneliti menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti cantumkan satu persatu. Juga tak kalah penting terima kasih untuk Valencia Lamarang yang sudah berusaha keras berjuang sejauh ini, berani keluar dari zona nyaman, mencoba hal baru, dan tidak pernah menyerah sesulit apapun dinamika perkuliahan-organisasi dan penyusunan skripsi ini. Hidup terus berjalan, ayo berjuang terus!!

Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak dengan memberi informasi mengenai penelitian terkait. Peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Terima kasih.

Penulis

Valencia Lamarang

ABSTRAK

Valencia Lamarang. *Network Governance* dalam Program Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar (Dibimbing oleh Syahribulan)

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan *Network Governance* dalam Program Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar. Fokus penelitian ini difokuskan pada empat indikator yang diusulkan oleh Klijn & Koppenjan (2012) yaitu: (1) *Actors, Interdependency, and Frames*; (2) *Interactions and Complexity*; (3) *Institutional Features*; dan (4) *Network Management*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan *Network Governance* dalam Program Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun semua indikator *network governance* telah dijalankan namun masih terdapat kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam program ini yang disebabkan oleh kurangnya dukungan pemerintah tingkat RT/RW. Temuan utama yang didapat oleh peneliti ialah ketiga aktor dalam jejaring ini yaitu pemerintah, sektor privat, maupun masyarakat memiliki hubungan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan telah tercapainya indikator penting dalam pelaksanaan jejaring pemerintahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya keterlibatan dari pemerintah mulai dari tingkat RT/RW untuk mendukung dengan mensosialisasikan program Bank Sampah di Kota Makassar.

Kata kunci: *Network Governance*; Bank Sampah; Kota Makassar

ABSTRACT

**Valencia Lamarang. *Network Governance* in The Bank Sampah Program in Toddopuli Raya, Makassar City.
(Supervised by Syahribulan)**

This research examines the role of Network Governance in Bank Sampah Program in Toddopuli Raya, Makassar City. This research focuses on four indicators proposed by Klijn & Koppenjan (2012), namely: (1) Actors, Interdependency, and Frames; (2) Interactions and Complexity; (3) Institutional Features; and (4) Network Management. This study aims to explain the role of Network Governance in the Bank Sampah Program in Toddopuli Raya, Makassar City. In this research, the author used descriptive qualitative research methods with data collection techniques through direct observation, in-depth interviews, and document review. The results of this study indicate that although all network governance indicators have been implemented, there are still obstacles such as the lack of community participation in this program caused by the lack of government support at the block club level. The main finding obtained by the researcher is that the three actors in this network, namely the government, the private sector, and the community, have an interdependent relationship with one another. This shows the achievement of important indicators in the implementation of government networks. The conclusion of this research is the need for involvement from the government starting from the block club level to support by socializing the Bank Sampah program in Makassar City.

Key Words: Network Governance; Bank Sampah; Makassar City

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tinjauan Teori	9
1.2.1. Administrasi Publik.....	9
1.2.2. Administrasi Publik ke Arah <i>Governance</i>	9
1.2.3. <i>Governance</i>	11
1.2.4. <i>Network Governance</i>	12
1.2.5. Bank Sampah.....	16
1.2.6. Kerangka Pikir Penelitian	16
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	17
1.3.2. Manfaat Penelitian	17
BAB II. METODE PENELITIAN.....	18
2.1. Pendekatan Penelitian	18
2.1.1. Fokus Penelitian.....	18
2.2. Desain Penelitian.....	18
2.3. Prosedur Penelitian	19
2.3.1. Penentuan Informan.....	19
2.3.2. Teknik Pengumpulan Data	19
2.3.3. Teknik Analisis Data	20

2.3.4. Validitas dan Realibilitas Data	21
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	22
3.1 UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar	22
3.2 <i>Network Governance</i> dalam Program Bank Sampah	23
3.2.1 <i>Actors, Interdependency, and Frames</i>	23
3.2.2 <i>Interactions and Complexity</i> (Interaksi dan Kompleksitas).....	27
3.2.3 <i>Institutional Features</i> (Fitur Kelembagaan)	29
3.2.4 <i>Network Management</i> (Manajemen Jaringan)	31
BAB IV. PENUTUP.....	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Armada Operasional UPT Bank Sampah	22
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proyeksi Timbulan Sampah di Indonesia (2017-2025).....	2
Gambar 2. Bank Sampah Pusat Kota Makassar.....	5
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

BIODATA.....	41
DAFTAR NAMA INFORMAN.....	42
LOGBOOK PENELITIAN	43
DOKUMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH	46
SURAT IZIN MENELITI.....	49
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	50

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG

Istilah, Singkatan	Arti dan Penjelasan
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i> merupakan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk melayani masyarakat tanpa mengambil keuntungan.
UPT	Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja atau organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
BSP	Bank Sampah Pusat merupakan induk dari Bank Sampah di Kota Makassar yang terletak di jalan Toddopuli Raya
BSU	Bank Sampah Unit merupakan Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat RT, RW, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya.
MoU	Memorandum of Understanding merupakan perjanjian formal dengan pihak ketiga yang biasanya dibuat sebagai langkah awal untuk membuat kontrak kerja sama atau perjanjian yang lebih mengikat.
YPN	Yayasan Peduli Negeri merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi untuk memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan, dan berfokus pada aspek lingkungan, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sampah masih menjadi pembicaraan yang tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke tingkat pedesaan dan perkampungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sampah yaitu barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya; sama dengan kotoran seperti daun, kertas. Dari definisi tersebut diketahui bahwa sampah menjadi masalah karena merupakan suatu produk yang dihasilkan namun tidak memiliki nilai guna, malah menjadi persoalan bagi lingkungan karena mengganggu kebersihan, keasrian, keindahan, kenyamanan dalam hidup bermasyarakat bahkan dapat menjadi penyebab bencana seperti banjir.

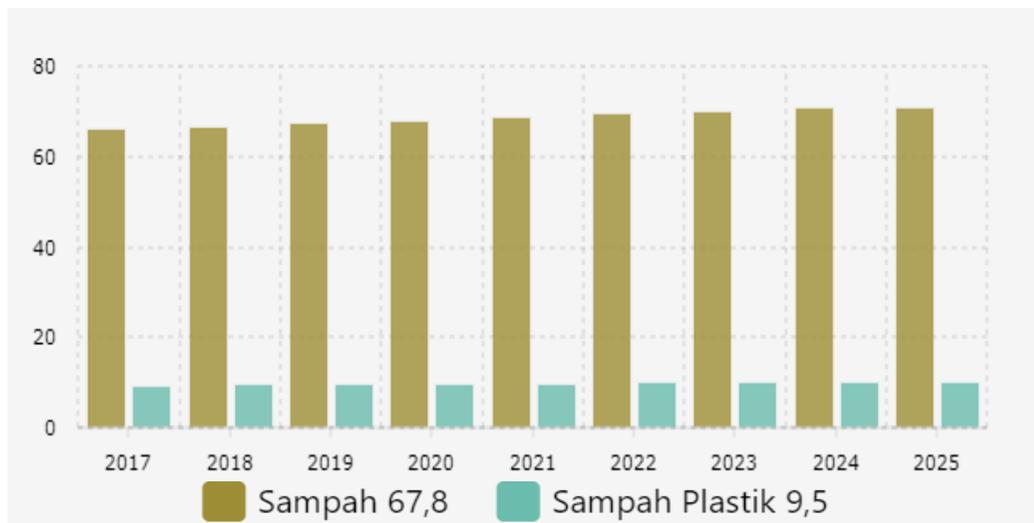
Indonesia kerap disorot sebagai salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia dan juga buruk dalam penanganan sampahnya. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilansir dari Kompas.id, proyeksi timbulan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dalam hampir sedekade terakhir. Melansir dari tahun 2017, proyeksi timbulan sampah plastik nasional mencapai 9,2 juta ton. Jumlah itu setara 13,98% dari total volume timbulan sampah RI. Timbulan sampah plastik di dalam negeri diproyeksikan terus bertambah selama 2017 hingga 2025 mendatang. Adapun timbulan sampah plastik pada 2025 diproyeksikan mencapai 9,9 juta ton, juga setara 13,98% dari total volume timbulan sampah periode tersebut.

Bukan hanya jumlah yang terus membesar, melainkan cara penanganannya pun demikian. Sampah yang tidak tertangani dengan benar menjadi sumber pencemaran, baik di darat maupun perairan seperti sungai dan laut. Kondisi ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya jumlah penduduk, sementara tempat pembuangan maupun pengelolaan sampah begitu terbatas. Belum lagi persoalan kesadaran masyarakat terhadap peneglolaan sampah yang belum merata.

Bersumber pada media *online* kemenkopmk.go.id (19/04/2024) mengatakan bahwa jumlah timbulan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton merupakan hasil input dari 202 kab/kota se Indonesia tahun 2022 menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65.71% (13.9 juta ton) dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% (7,2 juta ton) belum dikelola dengan baik. Mengingat jumlah tersebut, diketahui bahwa Indonesia pernah berada pada urutan kelima sebagai negara produsen sampah terbanyak di dunia yang tercatat dalam laporan Bank Dunia berjudul *The Atlas of Sustainable Deveopment Goals 2023*. Menurut laporan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia memproduksi sakitar 65,2 juta ton sampah pada tahun 2020. Besaran sampah di tanah air yang cenderung terus bertambah tiap tahun yang juga sejalan dengan jumlah penduduk yan terus bertambah. Dilansir dari data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,118,866 juta jiwa pada Juni 2023 dan

menurut data dari Badan Pusat Statistik penduduk Indonesia pada tahun 2024 mencapai 281,603,800 juta jiwa (webapi.bps.go.id pada 20/05/2024).

Gambar 1. Proyeksi Timbunan Sampah di Indonesia (2017-2025)



(Sumber: <https://databoks.katadata.co.id>)

Target tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, dengan potensi sampah mencapai ± 71 juta ton/tahun, dapat memberikan akses pelayanan penuh (100%), yaitu 30% melalui kegiatan pengurangan dan sisanya 70% melalui penanganan. Tantangan bersama yaitu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, bagaimana meningkatkan 12% tingkat pengurangan pada tahun 2017, menjadi 30% pada 2025. Begitu pula dengan 17% sampah yang belum tertangani, dibuang oleh masyarakat dengan cara yang tidak ramah lingkungan, melalui penimbunan, pembakaran terbuka, pembuangan ke sungai, bahkan berakhir di laut (Putra et al., 2019).

Dalam menangani permasalahan sampah ini dan atas pertimbangan dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa perlunya perubahan mendasar dalam pengelolaan sampah, yaitu dari kumpul-angkut-buang berubah menjadi pengolahan yang berpijak pada pengurangan sampah dengan maksud melakukan kegiatan 3R (*Reduce, Re-use, dan Recycle*) atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Dari TPS 3R tersebut maka lahirlah Bank Sampah di Kawasan atau suatu daerah sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Nomor

13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Re-use, dan Recycle* Melalui Bank Sampah.

Kota Makassar menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengadakan program Bank Sampah dan tersebar di beberapa kecamatan sebagai pelaksanaan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar pada tahun 2014 yaitu Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Makassar No. 63 Tahun 2014 tentang pembentukan UPT Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar dan diteruskan oleh pasangan walikota dan wakilnya pada saat ini yaitu Moh. Ramdhan Pomanto bersama Fatmawati Rusdi. UPT Pengelolaan Daur Ulang Sampah adalah UPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Perwali kota Makassar No. 63 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 dan bertindak sebagai Bank Sampah Pusat Kota Makassar sehingga menjadi titik lokus pada penelitian ini yang bertempat di Jl. Toddopuli Raya Kota Makassar.

Bank Sampah Pusat adalah instansi daerah yang berwenang dalam memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan Bank Sampah Unit (BSU) di Kota Makassar, yang selanjutnya menjadi mitra UPT Bank Sampah Pusat dalam mengelola sampah dengan menerapkan sistem 3R dan menjadikan sampah memiliki nilai ekonomis. Bank Sampah Unit dikelola oleh komunitas masyarakat baik di tingkat RW/RT maupun di tingkat kelurahan. Di BSU ini, sampah dikumpulkan dan dipilah sesuai jenisnya dan dikelola menggunakan sistem seperti perbankan dengan diberikannya buku tabungan kepada nasabah. Sampah yang ditabung oleh masyarakat akan ditimbang dan dihargai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengurus BSU. Hasil dari pengumpulan sampah di BSU tersebut selanjutnya dijual kepada UPT Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar.

Dalam implementasi pengelolaan Bank Sampah, pemerintah Kota Makassar berjejaring dengan pihak swasta dan masyarakat. Jejaring ini dilakukan untuk saling mengisi dan memaksimalkan sumber daya yang telah tersedia di setiap lembaga sehingga dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Makassar sebagai tujuan utama dari *Network Governance* ini. Dengan demikian, Pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan Unilever Indonesia dan Yayasan Peduli Negeri untuk mewujudkan lingkungan Kota Makassar yang bersih dan sehat.

Yayasan Peduli Negeri (YPN) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berdiri sejak tahun 2007 dan berfokus pada program lingkungan dan kesehatan serta berorientasi untuk memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan, Lingkungan, Kesehatan dan Pendidikan serta ekonomi yang terintegrasi. Nama salah satu LSM yaitu YPN ini diambil dari kepedulian serta kekeluargaan kepada seluruh masyarakat dan berupaya untuk membangun negeri yang lebih baik. Dalam program Bank Sampah, YPN bertanggung jawab dalam mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan pengolahan sampah.

Pihak swasta yang berperan dalam program Bank Sampah yaitu PT. Unilever yang memiliki asa untuk menciptakan dunia yang bersih dari sampah dengan menciptakan program *Green and Clean* yang didukung melalui adanya kegiatan Bank Sampah sebagai salah satu wujud programnya. Program *Green and Clean* didukung melalui kegiatan bank sampah, pengelolaan sampah secara mandiri,

memilah sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga), penanganan limbah domestik, daur ulang sampah menjadi barang bermanfaat seperti trashion dan kompos, kegiatan penghijauan, pemanfaatan air, sanitasi serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Program *Green and Clean* ini memberi ruang aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya, mengasah potensi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahan serta mampu melakukan usaha-usaha produktif. Kepedulian dan keaktifan PT. Unilever dalam Bank Sampah dibuktikan pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024, PT. Unilever menghimbau komunitas ibu dan generasi muda untuk mendukung peranan Bank Sampah (dikutip dari *website* resmi unilever.co.id pada 15/05/2024). Unilever juga berkomitmen untuk membantu mengatasi permasalahan limpahan plastic mulai dari hulu, tengah, sampai ke hilir rantai bisnis sehingga target yang mereka inginkan pada 2025, antara lain:

1. Pengurangan 50% plastik baru, termasuk pengurangan mutlak sebesar 100.000 ton dan mempercepat penggunaan plastic daur ulang hingga 25%.
2. Memastikan 100% kemasan plastik kami dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau diubah menjadi kompos.
3. Mengumpulkan dan memroses lebih banyak plastik daripada yang kami jual.

Untuk mewujudkan ketiga target tersebut, sehingga Bank Sampah menjadi tujuan Unilever untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Mereka menyadari bahwa sampah merupakan masalah besar yang pelik dan butuh penanganan segera.

Pengelolaan Bank Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk praktik kerjasama dengan PT. Unilever, Yayasan Peduli Negeri dan masyarakat sebagai perwujudan dari konsep *Governance* yaitu kolaborasi. Dalam kolaborasi yang dilakukan inilah tentunya terjalin interaksi dalam pelaksanaan pelayanan publik, program dan kebijakan publik, yang selanjutnya disebut dengan jejaring pemerintahan atau *networking governance*. Namun, dalam praktiknya efektivitas dari program Bank Sampah di Makassar belum mencapai 10 persen pada tahun 2023 yang dilansir dari artikel <https://sulsel.idntimes.com> (30/04/2024). Sama halnya yang tertulis pada artikel www.mongabay.co.id (30/04/2024) mengatakan bahwa Bank Sampah gagal dalam meminimalisir sampah yang masuk ke TPA Antang karena tingginya biaya operasional dibandingkan keuntungan yang didapatkan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ria Rezki Safitri (2023) tentang implementasi kebijakan Bank Sampah dalam mendukung upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kec. Panakkukang Kota Makassar menjelaskan kendala-kendala dalam implementasi Bank Sampah seperti rendahnya harga penjualan sampah yang ditawarkan sehingga membuat masyarakat menjadi pasif. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan salah satu tujuan program Bank Sampah yakni membantu perekonomian masyarakat. Selain rendahnya harga jual, kendala lain yaitu terbatasnya sarana dan prasarana di Bank Sampah Pusat maupun yang ada di unit dan faktor yang terakhir ialah kurangnya koordinasi antar lembaga

pemerintahan yang berperan dalam implementasi Bank Sampah di kecamatan Panakkukang (Safitri, 2023). Selain itu, kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mendukung program Bank Sampah di Kota Makassar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi atau sosialisasi dari RT/RW untuk mengajak dan menghimbau masyarakat menjadi nasabah dari Program Bank Sampah. kekurangan lain yang ditemukan dalam observasi ialah keterbatasan jumlah armada operasional penjemputan sampah.

Gambar 2. Bank Sampah Pusat Kota Makassar



(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

Saat ini birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam tatanan kehidupan. Banyak aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh birokrasi. Masyarakat tidak dapat menghindari birokrasi dalam berbagai hal, seperti kelahiran, pernikahan, perizinan usaha, dan kematian. Selain itu, masyarakat masih sangat bergantung pada birokrasi. Birokrasi memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat dari perspektif kebudayaan. Karena orang cenderung tunduk pada orang yang memiliki status sosial lebih tinggi, status sosial adalah aset kekuasaan. Birokrasi menguasai aspek-aspek yang sangat luas dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena jenis dan luasnya. Birokrasi menguasai anggaran, staf, sumber daya alam, proyek, dan pengetahuan yang tidak dimiliki pihak lain. Posisi dan kemampuan birokrasi sangat besar; mereka memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis dan memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, birokrasi, bersama dengan aparaturnya, memiliki banyak keahlian teknis yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam hal ini termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, dan pengelolaan transportasi, antara lain. Selain itu, birokrasi Indonesia bertanggung jawab atas perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta evaluasi kinerjanya (Sholihatin, 2012).

Administrasi publik diumpamakan sebagai tali penghubung antara pemerintah dengan publik atau masyarakat (Malawat, 2022). Konsep administrasi publik abad

ini, tidak lagi sekedar sebagai instrumen birokrasi negara saja, tetapi fungsinya lebih dari itu. Administrasi publik sebagai instrumen kolektif dan juga menjadi sarana publik untuk melaksanakan tatakelola kepentingan bersama dalam jaringan kolektif untuk mencapai tujuan publik yang telah disetujui. Dengan adanya pergeseran pemahaman administrasi publik ini, menandakan bahwa adanya peranan penting dari publik atau masyarakat dalam jejaring pemerintahan (Rukmana, 2020).

Dalam paradigma yang baru, pemerintah tidak lagi memiliki peran yang dominan dan memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk melaksanakan pelayanan publik tanpa melibatkan aktor lain. Peran dominan pemerintah akan bergeser dari operasi langsung di semua sektor strategis kepada kondisi yang bersifat mengarahkan (*steering*) dan memberdayakan (*empowering*) melalui serangkaian kebijakan (Fatmawati et al., 2019). Konsep jejaring pemerintahan dalam paradigma sistem pemerintahan yang baru atau dikenal dengan *governance* terdiri atas tiga pilar penting, yakni pemerintah, sektor privat, dan masyarakat, berubah dari yang sebelumnya yaitu penyelenggara pemerintahan hanyalah *government* atau pemerintah saja. Hubungan ketiga pilar tersebut memiliki kedudukan yang seimbang dan saling kontrol (*checks and balances*) yang bertujuan untuk menghindari dominasi satu aktor untuk melakukan eksploitasi satu sumber daya terhadap sumber daya lainnya (Salsabila, 2023).

Pada masa ini pemerintah dituntut untuk selalu menyediakan apa yang diinginkan serta menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang layak. Namun, pemerintah sebagai penyedia layanan memiliki banyak keterbatasan sumber daya baik itu manusia, teknologi, informasi, serta keuangan. Sehingga untuk melengkapi keterbatasan-keterbatasan tersebut, hadirnya konsep baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan yaitu *Network Governance* sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan sumber daya.

Pada prinsipnya, teori jaringan atau *network* didasari pada asumsi bahwa hubungan yang terjalin antar *stakeholder* bersifat saling ketergantungan satu dengan lainnya (*interdependence*). Dalam artian pada proses *network* para aktor tidak dapat mencapai tujuannya jika hanya mengharapkan kemampuannya saja. Sehingga mereka harus memanfaatkan sumber daya yang dimiliki aktor lain (Taufik, 2017). Selain *interdependence*, *network* berprinsip untuk saling menguntungkan yaitu dengan saling berbagi pengalaman (*sharing of experiences*), saling berbagi manfaat (*sharing of benefits*), serta saling berbagi dalam memikul beban (*sharing of burdens*) (Sholihatin, 2012). Sehingga dalam jejaring pemerintahan atau kelembagaan, tidak akan ada lagi aktor yang dominan, tidak ada lagi aktor yang memiliki kekuasaan untuk mendikte/ memaksa aktor lainnya, tidak ada lagi aktor tunggal yang monolitik, tetapi akan ada banyak aktor yang semuanya memiliki kepentingan, tujuan, dan oposisi. Pada konsep inilah kekuasaan akan bersifat lebih menyebar, semua *stakeholder* hanya berbeda dalam konteks apakah mereka lebih atau kurang otonom. Dalam proses pembuatan keputusan pun akhirnya berubah menjadi lebih kepada proses negosiasi. Perspektif teoritis dari jejaring pemerintahan pun pada masa ini telah mengalami perkembangan menjadi lebih lengkap, juga disertai pada sudut pandang praktik organisasi lebih tersistematis dan komprehensif.

Pendekatan jejaring (*network approach*) dalam kebijakan publik, mengalami perkembangan pesat dengan pertumbuhan organisasi *cluster* dan *quango* sebagai hasil interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Jejaring kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan (Suwitri, 2008). Sebagai ciptaan baru dalam administrasi publik, *Network Governance* dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan memecahkan tantangan utama pemerintah seperti keterbatasan sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik yang melibatkan beberapa stakeholder (Alwi et al., 2023). *Network Governance* diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat. Layanan publik yang diselenggarakan pemerintah untuk menangani masalah kompleks yang dihadapi pada saat ini salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup. yaitu pada permasalahan sampah (Fatmawati et al., 2019).

Secara umum, jika dikelola dengan baik konsep *network governance* menjadi konsep yang paling ideal dan menguntungkan ketika ingin mencapai tujuan bersama yang kompleks. Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan konsep *network governance* sebagai tolak ukur keberhasilan kerjasama antar beberapa stakeholder dilakukan oleh (Ginting, 2021) tentang "*Network Governance dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru*" menunjukkan terdapat beberapa kendala implementasi *network governance* yaitu pada sisi keterlibatan pengawasan, komitmen, serta yang paling penting ialah koordinasi para stakeholder masih kurang. Pada penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Provan & Kennis (2008) untuk mengukur keberhasilan implementasi konsep *network governance*.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyanti & Nugroho, 2019) mengenai "*Governance Network in Sustainable Tourism Development: A case of thematic kampung tourism in Malang, Indonesia*" menunjukkan keberhasilan *network governance* membawa perubahan di Kampung Warna-Warni mulai pada masalah lingkungan, perilaku masyarakat yang lebih aktif dan inisiatif, sehingga dinobatkan menjadi salah satu tipe ideal untuk pariwisata berkelanjutan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terletak pada penerapan konsep *network governance* dalam perkembangan sektor pariwisata berkelanjutan dengan mengadopsi teori dari Provan & Kennis (2007).

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh (Rossilawati, 2023) tentang "*Network Governance dalam Peningkatan IPM Perempuan di Kabupaten Wonogiri*" menyimpulkan bahwa proses *network governance* dalam peningkatan IPM perempuan di Kab. Wonogiri belum terlaksana secara maksimal. Relevansi kedua penelitian yaitu sama-sama mengadopsi konsep *network governance* dari Klijn & Koppenjan (2012). Namun, pada penelitiannya terdahulu berfokus pada penggunaan *network governance* dalam pelayanan peningkatan masyarakat khususnya IPM perempuan.

Selanjutnya penelitian yang juga mengadopsi teori dari Klijn & Koppenjan (2012) yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Bonso & Ahmad, 2021) tentang

efektivitas birokrasi dalam pelayanan publik pada pemerintah daerah Kab. Biak Numfor. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan publik pada pemerintah daerah Kab. Biak Numfor sudah terlaksana dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala. Kedua penelitian mengadopsi konsep dari Klijn, Koppenjan (2012) untuk menganalisis efektivitas birokrasi dalam pelayanan publik. Namun, pada penelitian terdahulu berfokus pada konsep analisis efektivitas birokrasi dalam pelayanan publik

Adapun penelitian yang juga mengambil lokus di Bank Sampah Pusat Kota Makassar Jl. Toddopuli Raya dilakukan oleh (Bunga, 2023). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Bank Sampah melakukan praktik *collaborative governance* menurut konsep Ansell dan Gash dan menunjukkan bahwa dalam program pelayanan Bank Sampah ini terdapat beberapa aktor yang terlibat berkolaborasi untuk menyelesaikan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Re-use, dan Recycle Melalui Bank Sampah di Kota Makassar. Kedua penelitian dilakukan di Bank Sampah Pusat Kota Makassar. Perbedaan penelitian ini ialah pada penelitian terdahulu mengangkat konsep *collaborative governance*.

Kelebihan dari *network governance* mencakup hal-hal yang memungkinkan untuk menjalankan misinya (mencapai tujuan bersama) dan memiliki *output* yang positif seperti *network governance* ideal untuk menyelesaikan masalah kontemporer yang rumit dari berbagai latar (sosial, lingkungan, politik, ekonomi) juga mencakup peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan perencanaan serta peningkatan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan efisiensi karena meningkatnya jumlah pemikir dan perspektif. Sebagai contoh keuntungan dari konsep *network governance* dapat dilihat dari penelitian terdahulu oleh Prasetyanti & Nugroho (2019) yang meneliti tentang keberhasilan *network governance* membawa perubahan pada sektor pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irfandi, Dedy Heriwibowo, & Reza Muhammad Rizqi (2023) keberhasilan *network structuring* dalam konsep *network governance* berhasil diterapkan terhadap efektivitas penyusunan LPPD di Kabupaten Sumbawa Barat (Irfandi et al., 2023). Dari kedua hasil penelitian menunjukkan bahwa “efek samping” atau *output* yang diperoleh jika mengadopsi konsep *network governance* secara maksimal yaitu dapat memberdayakan masyarakat maupu *stakeholder* yang terlibat dan meningkatkan pemahaman mengenai masalah yang lebih kompleks. Jika dilihat dari sektor privat, terjadi peningkatan daya saing dan kepuasan pelanggan (Bogason & Musso 2006; Provan & Kenis 2008; Sandström, Bodin & Crona 2015). Namun, kendala bahkan kerugian akan diperoleh jika konsep dari *network governance* tidak diadopsi secara maksimal seperti ketidakstabilan relatif (sisi negatif dari fleksibilitas) dan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kontrol yang berlebihan dan yang tidak memadai (Sandström, Bodin & Crona 2015). Hal yang sama pentingnya adalah masalah akuntabilitas dan legitimasi internal dan eksternal (Hansson & Longva 2014). Terakhir, selalu ada kemungkinan terjadinya salah urus dan penyalahgunaan kekuasaan dalam situasi yang melibatkan kekuasaan (Bogason & Musso 2006; Provan & Kenis 2008). Sehingga untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan, jenis spesifiknya harus disesuaikan dengan tujuan dalam

jejaring, dan konsep *network governance* perlu dikelola dengan baik untuk menggunakan keuntungan dan menyeimbangkan kerugian dari bentuk tata kelola jejaring pemerintahan.

Oleh karena itu, untuk menjelaskan bagaimana peranan jejaring pemerintahan dalam pelaksanaan Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “*Network Governance dalam Program Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar*”. Berdasarkan fenomena yang terjadi maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimana penerapan *network governance* dalam program Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar?

1.2. Tinjauan Teori

1.2.1. Administrasi Publik

Administrasi publik di Indonesia seringkali diartikan dalam pengertian “sempit” yaitu kegiatan tulis-menulis, mengetik, dan segala hal yang berhubungan dengan persuratan. Namun, secara harfiah administrasi publik bermakna suatu kerjasama yang dilakukan baik itu sebuah kelompok maupun organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam bukunya, Sondang P. Siagian mengartikan administrasi publik sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2012).

Administrasi publik terdiri dari dua kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *ad* yang artinya intensif dan *ministrare* yang artinya melayani (*to serve*). Dengan demikian, administrasi adalah membantu atau melayani dengan intensif. Sedangkan publik mengandung arti umum, negara dan masyarakat atau orang banyak. Sehingga administrasi publik dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (seperti sarana dan prasarana, teknologi, dan modal) guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diperuntukkan bagi pelayanan kepada masyarakat. Adapun pengertian lain mengatakan administrasi publik sebagai suatu seni (*art*) atau keterampilan dalam mengatur hubungan-hubungan dan melaksanakan tugas serta sebagai disiplin ilmu (*science*) yang bertujuan dalam pemecahan permasalahan publik (Maksudi, 2017).

1.2.2. Administrasi Publik ke Arah Governance

Dalam perkembangannya, administrasi publik berkembang dari beberapa paradigma atau cara pandang yang menggambarkan adanya perubahan serta perbedaan dalam tujuan, teori, maupun metodologi atau dalam bangunan epistemology serta nilai-nilai yang mendasari. Menurut Nicolas Henry perkembangan dan pergeseran paradigma administrasi publik dimulai pada masa “*administration dichotomy*” sampai masa “*governance*” dijelaskan sebagai berikut.

1. *The Politics – Administration Dichotomy* (1900 – 1926)

Paradigma yang dipelopori oleh Woodrow Wilson ini memberikan orientasi ilmiah dengan membedakan antara “fakta” dan “nilai”. Dalam pandangan ini terjadi pemisahan politik dan fungsi pemerintahan sebagai

bentuk strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Terdapat empat persyaratan administrasi publik yang efektif, yaitu (1) pemisahan politik dan administrasi; (2) analisis komparatif dari organisasi politik dan swasta; (3) meningkatkan efisiensi dengan praktik dan sikap yang mirip dengan bisnis terhadap operasi harian; dan (4) meningkatkan efektivitas layanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri, serta mendorong penilaian berdasarkan prestasi (Henry, 2007).

2. *The Principles of Administration* (1927 – 1937)

Paradigma yang diawali dengan terbitnya buku "*Principles of Public Administration*" oleh W. F. Willoughby ini membahas tentang prinsip-prinsip administrasi yang dipandang dapat berlaku secara menyeluruh pada setiap bentuk kelompok atau organisasi dan setiap lingkungan sosial-budaya.

3. *Public Administration of Political Science* (1950 – 1970)

Paradigma ketiga yang diperkenalkan oleh Nicolas Henry (2007) menjelaskan adanya keinginan kuat dari ilmuwan politik untuk merebut kembali administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Dalam waktu yang sama, juga terdapat peningkatan upaya dari ilmuwan manajemen mengklaim disiplin ilmu administrasi publik menjadi rumpun dari ilmu manajemen. Dalam pandangan ini mengimplementasikan upaya membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu sehingga administrasi kembali bertemu induk ilmunya yaitu ilmu politik sebagai hasil dari perubahan dan pembaruan.

4. *Public Administration as Management* (1956 – 1970)

Pada paradigma ketiga dan keempat inilah, kedua disiplin ilmu bersaing untuk memperebutkan dan mengakui bagian dari administrasi publik. Paradigma administrasi sebagai manajemen merupakan hasil dari kemenangan para ilmuwan manajemen untuk membawa administrasi publik sebagai bagian dari ilmu manajemen.

5. *Public Administration as Public Administration* (1970 – sekarang)

Juga dikenal sebagai tahap *New Public Management* (NPM) menjadi tanda administrasi publik ditegakkan sebagai bidang studi keilmuan yang otonom. Fokusnya terletak pada hierarki, birokrasi bergeser menjadidi pasar dan organisasi sektor swasta. Dengan istilah lain bahwa terjadi perpindahan dari mmodel administrasi lama (tradisional) ke model NPM. Paradigma *New Public Management* terbukti jelas bahwa terjadidi perubahan dalam tatanan administrasi publik, tetapi paradigma ini pun mengalami masalah yakni ketidakefisienan dalam sistem administrasi karena berasal dari perpaduan konsep ekonomi dan teknik manajemen sektor swasta. NPM memindahkan sektor publik menjadi sektor swasta dengan konsep model bisnis yang dikenal sebagai "*governance*".

6. *Governance* (1990 – sekarang)

Istilah *governance* digunakan untuk menggambarkan proses mendasar dari pemerintahan modern yang berbeda dengan pemerintahan tradisional. Secara keseluruhan, "*governance*" mensyaratkan penyerahan

pelayanan (desentralisasi/ pembagian kekuasaan dan fungsi) kepada jaringan organisasi nirlaba, perusahaan swasta maupun kepada tingkat pemerintahan lainnya. Pada dasarnya, "governance" melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemitraan ini termasuk melibatkan penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik maupun swasta (Gibson, 2011). *Governance* memerlukan sektor lain (menguntungkan secara keuangan dan atau tidak) untuk menyediakan layanan, sementara pemerintah hanya mengatur dan mengarahkan. *Governance* diartikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk menyejahterahkan masyarakat, memiliki proses yang kompleks ditandai dengan terlibatnya beberapa sektor masyarakat menjadi pemegang kekuasaan, memberlakukan dan menyebarkan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh kepada masyarakat dan lembaga serta pada pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014) dalam (Astuti et al., 2020).

1.2.3. Governance

Governance berasal dari kata "*govern*" yang berarti mengambil peran yang lebih besar dan termuat dari proses, aturan, dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga serta unsur masyarakat, baik itu pemerintahan maupun non-pemerintah. Menurut Roderick Arthur William Rhodes dalam (Astuti et al., 2020) mengatakan bahwa *governance* merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan (*new process of governing*), perubahan kondisi kaidah pengaturan (*a changed condition ordered rule*), atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur (*new method by which society is governed*) (Rhodes, 1996). Peralihan dalam "penyelenggaraan kebijakan publik" yang tidak hanya berpusat pada pemerintah tetapi juga melibatkan aktor lain, seperti perusahaan swasta dan masyarakat, untuk berpartisipasi, dikenal sebagai *governance*. Umumnya, istilah "*governance*" sebagai kata ganti dari "*government*" namun, perlu diingat bahwa "*governance*" bukanlah sinonim dari "*government*". Mengingat fakta bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya semakin kompleks, manajemen menyadari betapa pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan.

Pada dasarnya sebuah *governance* akan berbeda pada siapa yang memiliki pengaruh atau kekuatan untuk mengatur dan mengoordinasikan sebuah kebijakan, program, dan proyek, atau lebih khusus mengenai lagi: bagaimana dasar hukum dan peraturan yang ada; orientasi demokratis; hubungan prinsipal antara anggota/ agen; proses implementasi; dan bentuk/ kondisi akuntabilitasnya. Menurut Rhodes (1996) dalam (Astuti et al., 2020) terdapat empat karakteristik dari *governance*, yakni:

1. *Governance* bermakna lebih luas daripada *government* dengan melibatkan aktor non-negara yang menjadikan ada hubungan saling ketergantungan antar organisasi;
2. Keberlanjutan hubungan interaksi antar anggota karena dilatarbelakangi kebutuhan pertukaran sumber daya dan negosiasi untuk membagi bersama;

3. Berakar pada hubungan saling percaya dan diregulasikan dengan peraturan akibat dari negosiasi dan kesepakatan antar aktor; dan
4. Memiliki derajat signifikan untuk terlepas atau otonom dari pemerintah.

Pergeseran *government* ke *governance* ditujukan sebagai demokratisasi administrasi publik. *Governance* mengindikasikan penyebaran wewenang dari satu aktor menjadi *multi actor*. Sehingga dalam beberapa urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal dalam hal ini pemerintah berubah menjadi dikelola secara bersama oleh beberapa *stakeholder* yaitu swasta dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Keseimbangan peran tersebut dapat terwujud dengan keterlibatan aktor diluar pemerintah dalam tata kelola pemerintahan. Keterlibatan yang dimaksud bukanlah memegang kendali atas pemerintahan, akan tetapi keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan publik sesuai dengan segmentasi kemampuan aktor (Aisah, 2015).

1.2.4. **Network Governance**

Network yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia ialah jaringan, dalam bidang biologi berarti susunan sel-sel khusus yang sama pada tubuh dan bersatu dalam menjalankan fungsi biologis tertentu, sedangkan dalam dunia komputer sama dengan sekelompok komputer yang dihubungkan dengan fasilitas komunikasi. Dari kedua definisi tersebut terdapat persamaan makna yaitu terususun atau memiliki lebih dari satu pemeran atau aktor yang saling terkait dalam menjalankan suatu tugas. Sehingga jika dilihat dari perspektif administrasi publik, maka *network* atau jaringan atau jejaring merupakan hubungan sosial yang terjalin antara ketiga pilar *governance* baik itu institusi, lembaga, maupun aktor lainnya yang terlibat dan saling bergantung dalam rangkaian proses pengambilan suatu keputusan maupun pelaksanaan pelayanan publik.

Network governance merupakan interaksi antar aktor dalam pelaksanaan pelayanan publik, program dan kebijakan publik. Interaksi yang dimaksud yaitu berbagai aktor memiliki kepentingan, pengetahuan, dan perspektif yang berbeda dalam menangani suatu permasalahan yang kompleks. Awal kemunculan konsep *Network Governance* diawali dari perkembangan teori mengenai Tata Kepemerintahan atau *Governance* yang begitu pesat serta dari adanya perkembangan demokrasi liberal. Dari perkembangan demokrasi liberal itulah yang menjadi penyebab adanya konsep kesetaraan dalam implementasi jejaring pemerintahan sehingga melahirkan pandangan baru bahwa setiap aktor, institusi, atau lembaga dalam pengelolaan kepentingan publik memiliki peranan yang setara. Kemudian istilah *network* lebih berfokus pada struktur organisasi atau lembaga yang lebih fleksibel namun tetap mengedepankan kepercayaan yang terjalin antar sesama *stakeholder*. Dengan dibangunnya rasa kepercayaan antara aktor yang terlibat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan proses kerja sama karena *network* bersifat tidak mengikat secara keseluruhan. Jejaring pemerintahan merujuk pada pendapat dari Osborne (2010) dalam (Sholihatin, 2012) berada dalam kajian *new public governance*. Perspektif *new public governance* memfokuskan pada lima

prinsip diantaranya *Social-Political Governance*, *Public Policy Governance*, *Administrative Governance*, *Contract Governance*, dan *Network Governance*.

Dalam pendekatan *social network theory* (Klijn & Koppenjan) menjelaskan tentang adanya koordinasi antar aktor dalam pelaksanaan jejaring kebijakan publik yang kompleks. Proses interaksi antara aktor dalam organisasi jejaring sangat dipengaruhi oleh elemen koordinasi. Sama halnya dalam jejaring pemerintahan, koordinasi merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian tujuan organisasi jaringan. Aktor individu maupun aktor kelompok dalam jejaring kelembagaan harus berinteraksi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya jejaring pemerintahan merupakan hubungan yang terkoordinasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah untuk mengoptimalkan proses pembangunan yang memberdayakan sumber daya dan membangun institusi yang sehat untuk pengoptimalan sistem produksi yang efektif (Mayarni et al., 2022).

Dalam Tiihonen (2004:58) menekankan bahwa sifat dasar dari *network* ialah untuk mengkoordinasikan dan mengatur sebuah jaringan kompleks yang terdiri atas beberapa *stakeholder* dari latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki tugas yang berbeda pula. Sehingga pemerintah bertindak tegas dalam pengarahannya terhadap proses sosial dengan banyak aktor dan kepentingan yang berbeda satu sama lain.

Peneliti pertama *network governance* yaitu Keith G. Provan & Patrick Kenis menjelaskan bahwa konsep *network governance* menitikberatkan pada interaksi antar aktor dalam urusan pemerintahan serta melibatkan fungsi dari institusi dan struktur yang berwenang untuk bekerjasama dalam mengalokasikan sumberdaya dalam jejaring. (Provan & Kenis, 2005) yang berfokus pada tiga indikator utama yaitu

1. Jumlah aktor yang terlibat

Kunci dalam melakukan jejaring kelembagaan ialah dengan mengetahui jumlah aktor yang terlibat di dalamnya dan yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Dengan kepelbagaian dari tugas dan fungsi setiap aktor yang terlibat dalam jejaring kelembagaan akan lebih cepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Provan & Kenis, 2005).

2. Kewenangan masing-masing aktor

Setiap lembaga atau aktor yang tergabung dalam suatu jejaring memiliki wewenang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga dengan kewenangan yang diberikan kepada setiap lembaga mampu meminimalisasi beban kerja yang dilaksanakan oleh satu aktor dan memengaruhi durasi penyelesaian permasalahan.

3. Tujuan melakukan *network governance*

Adanya *network governance* sebagai media untuk menyerasikan dari berbagai peranan stakeholder dalam jejaring sehingga mencapai tujuan yang tunggal yang dapat menguntungkan bagi semua aktor. Sehingga perlunya peranan antar lembaga yang sesuai dengan keahlian masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan secara terorganisir dan tidak hanya mengedepankan kepentingan lembaganya saja, namun lintas

sektoral juga sehingga profitabel bagi semua yang berperan dalam jejaring pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan dari konsep *network governance*, Laia Martinez mengungkapkan bahwa *governance networks* dapat dijadikan sebagai platform kolaborasi dan manajemen strategi yang diperlukan pada proses interaksi yang dapat mempercepat inovasi di sektor publik serta dapat memfasilitasi kolaborasi diantara para stakeholders untuk menciptakan gagasan inovatif yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan publik. Melalui jejaring pemerintahan, pemerintah memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjangkau permasalahan lebih dekat dengan memanfaatkan keunggulan network serta mengembangkan gagasan inovatif untuk menanggulangi masalah publik maupun meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan publik. Karakteristik dari *governance network* menurut independen (Martinez, 2011), antara lain:

1. *Interdependency of actors*

Aktor yang terlibat dalam jejaring pemerintahan saling bergantung pada sumber daya atau kapasitas yang mereka miliki tetapi dapat beroperasi secara independen (Martinez, 2011).

2. *The necessity of exchange for resources*

Alasan utama para aktor saling berinteraksi dan tergabung dalam jejaring ialah untuk memenuhi kebutuhan dengan pertukaran sumber daya (seperti uang, informasi, serta keahlian) untuk mencapai tujuan dan menghindari ketergantungan yang berlebihan independen (Martinez, 2011).

3. *The interactions*

Dalam sebuah jejaring, aktor yang terlibat akan bernegosiasi untuk mencapai tujuan bersama yang didasarkan pada kepercayaan dan diatur dalam regulasi yang telah dibentuk.

4. *Self-organizing and self-regulating*

Jejaring pemerintahan atau kelembagaan memiliki tingkat otonomi dari negara dan tidak bertanggung jawab langsung kepada negara karena jejaring dapat mengorganisir dan mengatur diri sendiri. Peranan sebuah negara bukan yang tertinggi dalam suatu jejaring, namun dapat mengarahkan secara tidak langsung.

5. *Contribute to the production of a public purpose*

Dalam jejaring pemerintahan/ kelembagaan menetapkan landasan seperti visi, rencana, kebijakan, peraturan, dan tindakan yang akan diterapkan dan tertuju kepada pelayanan publik.

6. *The relatively institutionalized framework*

Kerangka kerja menjadi tempat para aktor yang terlibat saling berinteraksi. Kerangka kerja terbentuk dari pola interaksi dari para aktor.

7. *Diversity of the actors*

Karakteristik inti dari *governance network* ialah keberagaman aktor yang terlibat. Keberagaman yang dimaksud ialah aktor yang berasal dari latar belakang masing-masing sehingga memiliki kepentingan, keahlian, sumber daya yang berbeda-beda pula.

Klijn dan Koppenjan (2012) menyatakan bahwa teori *networks governance* telah berkembang menjadi teori yang mendapatkan keunggulan dalam administrasi publik. Perkembangan yang terjadi merupakan *hybrid* yang menggabungkan mekanisme teori-teori administrasi publik lama, seperti NPM dengan teori lainnya yang bertujuan untuk dapat mengatasi potensi dan resiko kompleksitas permasalahan dalam pemerintahan (Rofita, 2022). Adapun teori yang berkembang tentang *network governance* menurut Klijn & Koppenjan (2012) yaitu:

a. *Actors, Interdependency, and Frames*

Dalam bukunya yang berjudul *Governance Network Theory: Past, Present, and Future*, Klijn & Koppenjan menyebutkan bahwa elemen pertama yang harus dipenuhi dalam membina suatu jejaring pemerintahan ialah aktor yang memiliki tujuan serupa namun dari latar belakang yang berbeda-beda dan saling bergantung. Pada faktor ini juga menjelaskan mengenai tugas dan wewenang masing-masing dari tiap aktor yang tergabung untuk mengimplementasikan program dan kebijakan dalam suatu jejaring atau *network* (Klijn & Koppenjan, 2012).

b. *Interactions and Complexity*

Para aktor dari latar belakang masing-masing tentunya memiliki strategi atau kebijakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pada konsep ini, aktor yang saling bergantung melakukan interaksi dan negosiasi untuk menghasilkan sebuah kebijakan atau program pelayanan publik. Keuntungan dari *network* inilah sehingga memunculkan kebijakan, program, maupun strategi yang lebih kompleks dalam penyelesaian permasalahan. Satu hal yang penting dari konsep *network* bahwa tidak ada aktor tunggal yang berperan penting dalam terjadinya interaksi (Klijn & Koppenjan, 2012).

c. *Institutional Features*

Kompleksitas hubungan interaksi antar aktor akan memunculkan sebuah regulasi yang mengatur keberlangsungan dari jejaring, berkaitan dengan cara aktor berperilaku, pertukaran sumber daya, dan batasan dalam pelaksanaan program. Seperangkat regulasi dalam suatu jejaring dapat mengacu pada undang-undang atau aturan yang ada di atasnya jika *network* tidak memiliki aturannya sendiri. Pentingnya suatu regulasi ialah agar dalam proses implementasi program atau kebijakan tidak keluar dari regulasi yang ada, hal ini tentunya memengaruhi kinerja jejaring dan dapat mengurangi biaya transaksi (Klijn & Koppenjan, 2012) dalam (Rossilawati, 2023).

d. *Network Management*

Dalam implementasinya, proses *network* membutuhkan panduan dan pengelolaan interaksi yang terjalin. Manajemen jaringan penting karena bertujuan untuk memfasilitasi interaksi dalam artian dengan adanya *network* mampu memberi akses bagi *stakeholder* untuk saling berinteraksi dan bernegosiasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Selain itu, dengan manajemen jaringan yang baik dapat mengelola pertukaran sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah jejaring (Klijn & Koppenjan, 2012).

1.2.5. Bank Sampah

Bambang Suwerda ialah seorang warga negara Yogyakarta yang menjadi pelopor program Bank Sampah. Sebagai warga negara yang prihatin terhadap keadaan sampah di lingkungannya, ia memulai kegiatan ini sejak 2006 dan mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan dan mengelola sampah seperti uang di bank konvensional. Konsep tersebut hingga akhirnya diadopsi menjadi program nasional pada tahun 2012 dengan disahkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Re-use*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.

Bank sampah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Istilahnya, Bank Sampah layaknya lembaga ekonomi dimana sampah menjadi alat tukar yang digunakan dalam kegiatannya karena berbeda dengan bank pada umumnya yang menggunakan uang sebagai alat tukar. Bank Sampah diciptakan berangkat dari keprihatinan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang semakin memburuk karena dipenuhi oleh berbagai jenis sampah. Oleh karena itu, tujuan Bank Sampah yaitu membantu menangani pengolahan sampah dan menanamkan kebiasaan baik kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah serta dapat mengelola sampah, memaksimalkan pemilahan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan, membantu masyarakat memahami nilai barang bekas layaknya sampah, serta mengurangi jumlah sampah yang dibuang dan berakhir menjadidi timbunan tidak berguna. Dengan keberadaan Bank Sampah dapat bermanfaat untuk terciptanya lingkungan yang sehat, rapih dan bersih karena kurangnya jumlah sampah di lingkungan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat pun dapat merasakan keuntungan dengan tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, selain itu juga menambah penghasilan masyarakat.

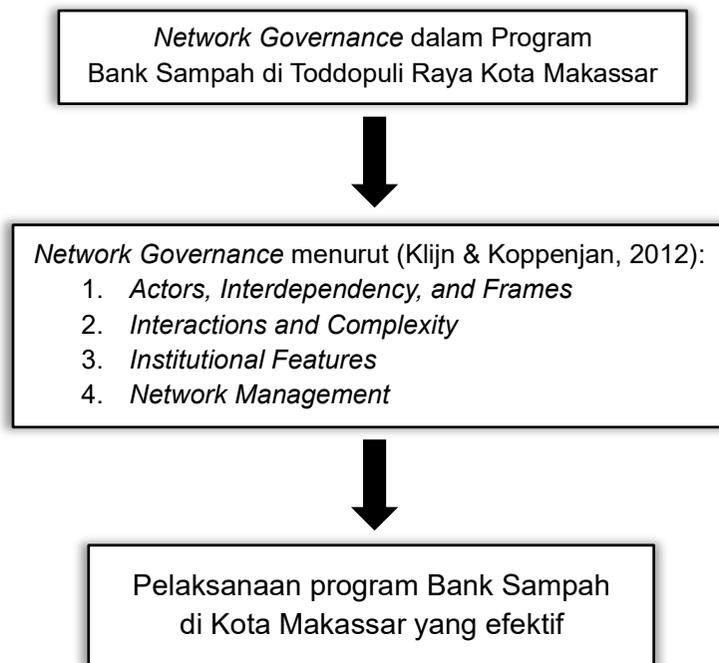
1.2.6. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini berfokus pada *Network Governance* dalam Program Bank Sampah Pusat di Kota Makassar tepatnya di Jalan Toddopuli Raya. Peneliti ingin menjelaskan *Network Governance* dalam penanganan permasalahan sampah di Kota Makassar melalui program Bank Sampah. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dicetuskan oleh Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2012) yaitu karena indikator yang dijelaskan mampu menguraikan fenomena yang terjadi di lapangan sehingga dapat ditemukan bahwa terdapat proses *Network Governance* dalam program Bank Sampah. Adapun indikator *Network Governance* menurut Klijn & Koppenjan yaitu:

- 1) *Actors, Interdependency, and Frames*
- 2) *Interactions and Complexity*
- 3) *Institutional Features*
- 4) *Network Management*

Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Network Governance* dalam mengelola Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar, maka penelitian ini mengacu pada kerangka pikir berikut ini:

Gambar 3. Kerangka Pikir



1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan *Network Governance* dalam Program Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang relevan dan sebagai sumber informasi bagi siapa pun yang ingin mengetahui jejaring antar organisasi yang terjalin di Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi para aktor yang berperan dalam program Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian *Network Governance dalam Program Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar*, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sehingga lebih berfokus pada pengamatan suatu kejadian dan lebih meneliti ke substansi makna dari kejadian tersebut. Dalam penelitian kualitatif lebih terpusat pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena lalu dituang dalam bentuk data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Menurut (Fiantika et al., 2022) secara ringkas mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang lalu dielaborasi dalam bentuk kata-kata untuk menjelaskan fakta dari fenomena tersebut.

2.1.1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada jejaring antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar. Teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah yang dikemukakan oleh Klijn & Koppenjan (2012). Sehingga fokus dari penelitian ini, yaitu:

1. *Actors, Interdependency, and Frames*, melihat bagaimana tugas dan wewenang setiap aktor dalam program Bank Sampah yang berasal dari latar belakang yang berbeda memiliki hubungan yang saling ketergantungan.
2. *Interactions and Complexity*, melihat bagaimana interaksi dari para aktor sehingga menghasilkan solusi yang kompleks untuk menyelesaikan permasalahan sampah dari program Bank Sampah di Kota Makassar.
3. *Institutional Features*, melihat bagaimana pentingnya keberadaan regulasi dalam proses implementasi program Bank Sampah di Kota Makassar.
4. *Network Management*, melihat bagaimana koordinasi para *stakeholder* dalam program Bank Sampah di Kota Makassar berjalan dengan baik.

2.2. Desain Penelitian

Pada edisi ke-5 buku John W. Creswell dan J. David Creswell (2015) menyajikan beberapa desain dalam pendekatan kualitatif yang terbagi atas lima penyajian yaitu naratif, fenomenologi, *grounded theory*, *etnografi* dan studi kasus. Adapun menurut Johnson (2005) dalam (Fiantika et al., 2022) terbagi atas tujuh jenis yakni *phenomenology*, *ethnography*, *action research*, *biography*, *grounded theory*, *design and development research*, dan *case study and filed research*. Desain penelitian yang digunakan ialah studi kasus yaitu dengan mengembangkan analisis terhadap suatu kasus dan dalam penelitian ini berupa program, aktivitas, serta proses dari jejaring beberapa stakeholder. Sehingga penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif bersifat deskriptif interpretative yaitu menguraikan

permasalahan hasil penelitian dari analisis pemahaman peneliti berdasarkan informasi yang ditemukan dari sumber data penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif interpretative merupakan suatu desain penelitian yang mendeskripsikan pandangan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari objek penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Adapun data primer pada penelitian ini yaitu berasal dari wawancara dan observasi.
2. Data sekunder, menurut Sugiyono (2013) merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Pada penelitian ini data sekunder berasal dari data yang dapat dicari dari sumber-sumber bacaan baik berupa laporan, jurnal, undang-undang, peraturan daerah, ataupun buku yang berkaitan dengan *Network Governance*.

2.3. Prosedur Penelitian

2.3.1. Penentuan Informan

Informan atau narasumber dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami permasalahan serta jejaring dalam penelitian ini. Sehingga yang menjadi informan pada penelitian *Network Governance dalam Program Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar*, yaitu:

1. Kepala Bank Sampah Pusat Kota Makassar
2. Manajer Lingkungan Yayasan Peduli Negeri
3. Kepala Bank Sampah Unit yang berhasil menerapkan Bank Sampah
4. Motivator Lingkungan Bank Sampah Kecamatan Mamajang & Tamalate
5. Masyarakat yang aktif berkontribusi dalam program Bank Sampah

2.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen sebagai pelengkap.

1) Teknik Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi dengan maksud ingin mengetahui fakta mengenai dunia kenyataan yang ingin dihasilkan melalui kegiatan observasi dengan melihat atau mengamati secara langsung situasi dan kondisi, tempat penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan di Bank Sampah Pusat Jl. Toddopuli Raya Kota Makassar, Bank Sampah Unit Asoka V Jl. Kumala Kec. Tamalate, dan Bank Sampah Unit Sitangkasi Jl. Beruang Kec. Mamajang.

2) Teknik Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara yaitu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah data dengan melakukan tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan pihak-pihak yang bersangkutan/ informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung bersama staff UPT Bank Sampah Pusat Kota Makassar, Manajer Lingkungan Yayasan Peduli Negeri, Motivator Lingkungan Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Tamalate, Pengurus Bank Sampah Unit Asoka V & Bank Sampah Unit Sitangkasi, serta nasabah aktif Bank Sampah Unit.

3) Telaah Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan dan gambar yang relevan dengan pelaksanaan *Network Governance* pada Program Bank Sampah di Toddopuli Raya Kota Makassar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto dan video. Telaah dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

2.3.3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh akan menggunakan empat tahapan ialah sebagai berikut:

1. *Data Collecting* (Pengumpulan Data)

Tahapan pertama yakni data collecting atau pengumpulan data, pada tahapan ini peneliti mengumpulkan seluruh data yang relevan dengan penelitian, termasuk data primer yang diperoleh dari hasil observasi langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari berkas, catatan, dokumentasi lain seperti gambar dan lain sebagainya.

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Pada tahap ini, peneliti akan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mengabstraksi/mentransformasikan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan. Data ini dapat berupa catatan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi pendukung lainnya.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah itu, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks yang terstruktur dan ringkas atau gambar sebagai representasi visual yang dimana dapat berupa dokumentasi.

4. *Conclusion drawing/ Verification* (Penarikan kesimpulan/ Verifikasi)

Tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dalam tahapan ini peneliti berusaha bersikap kritis, skeptis, dan terbuka agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.

2.3.4. Validitas dan Realibilitas Data

1. Validitas Data

Validitas data yang dimaksud yaitu alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang dibuat sesuai dengan pandangan Sutrisno dalam mengukur efektivitas dari suatu program sehingga penilaian atas keberhasilan efektivitas program tertuju dan sesuai dengan indikator keberhasilan pada penelitian ini.

2. Realibilitas Data

Realibilitas data yang dimaksud ialah konsistensi dari instrumen pengukuran. Dalam hal ini, peneliti mencocokkan data melalui hasil wawancara mendalam bersama para informan serta pengecekan hasil wawancara melalui informan yang berbeda dengan menemukan hasil wawancara yang sesuai, sehingga ditemukan hasil serta data wawancara yang akurat dan konsisten.